

## **BERITA: PERTEMUAN IPWP MENDESAK KUNJUNGAN PBB YANG MENDESAK KE PAPUA BARAT**

19 Oktober 2023



Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) mengadakan pertemuan besar di Parlemen Inggris pada hari kemarin (18 Oktober 2023), meminta agar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia segera diizinkan mengunjungi Papua Barat.

Pertemuan IPWP diadakan untuk mendukung komunike yang baru-baru ini dikeluarkan pada Sidang Pimpinan Grup Spearhead Melanesia (MSG) pada bulan Agustus, yang mendesak Indonesia untuk memfasilitasi kunjungan PBB ke Papua Barat sebelum Sidang Pimpinan berikutnya pada tahun 2024. Indonesia telah berjanji untuk memfasilitasi kunjungan PBB pada tahun 2018. Lima tahun berlalu, janji tersebut belum juga terealisasi.

Lebih dari 85 negara kini telah mendesak kunjungan PBB tersebut. Ini termasuk semua negara anggota Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (OACPS), Komisi Eropa, serta negara-negara individual termasuk Inggris, Spanyol, dan Belanda. Pada Tinjauan Periode Universal (UPR) Indonesia tahun lalu di Jenewa, delapan negara, termasuk AS, Kanada, dan Australia, menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai situasi hak asasi manusia di Papua Barat dan mendesak penyelidikan internasional.

Pertemuan IPWP ini dipimpin oleh Alex Sobel, Anggota Parlemen dari Partai Buruh Inggris dan Ketua IPWP. Pemimpin kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda menyampaikan pidato di hadapan ruangan yang penuh, bersama dengan Jennifer Robinson dari Doughty Street Chambers dan Pengacara Internasional untuk Papua Barat (ILWP). Anggota Parlemen Eropa

dan Presiden Katalonia, Carles Puigdemont, serta Senator Gorka Elejabarrieta, keduanya Wakil Ketua IPWP, memberikan pidato melalui sambungan video.

Demonstrasi berlangsung di seluruh Papua Barat selama dua hari terakhir untuk mendukung pertemuan tersebut.

Benny Wenda mengatakan: "Saya menyambut baik komunikasi MSG, tetapi kata-kata harus diikuti dengan tindakan. Bahkan sejak pertemuan MSG, Indonesia telah membunuh banyak orang Papua Barat, menyiksa, dan mengungsi lebih banyak lagi. Para pemimpin Melanesia harus bertanya pada diri mereka sendiri: apakah kita berusaha menyelamatkan orang Papua Barat, atau kita membiarkan Indonesia melanjutkan pendudukannya dengan kebebasan dari hukuman? MSG dan PIF harus melakukan segala upaya untuk memastikan kunjungan tersebut."

Carles Puigdemont berkata: "Jika Indonesia memiliki komitmen serius untuk menjadi bagian dari komunitas internasional yang menghormati hak asasi manusia, tidak ada alternatif lain bagi Jakarta selain memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia saat ini juga... Saya meyakinkan Anda bahwa perjuangan kita yang adil untuk Papua Barat yang bebas akan terus berlanjut, di Parlemen Eropa dan di Komisi Eropa."

Gorka Elejabarrieta berkata: "Kami percaya bahwa laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Papua Barat harus diperhitungkan. Kami percaya bahwa komunitas internasional, terutama Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, tidak bisa mengabaikan masalah ini lagi. Indonesia harus mendukung dan memfasilitasi mekanisme komunitas internasional untuk menghormati hak asasi manusia secara penuh dan menghormati sepenuhnya hak-hak orang Papua Barat."





